

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**WIDYA ALAWIYAH
201620251005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Widya Alawiyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Juli 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0319046403

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : Widya Alawiyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620251005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/ Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juli 2018

Jakarta, Juli 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIDN : 0714125801

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH

NIDN : 0323035802

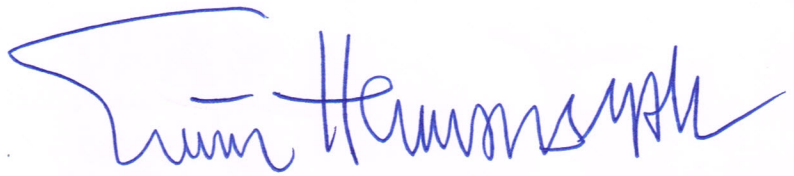
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Widya Alawiyah
201620251005

ABSTRAK

Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian aturan tersebut di atas dirubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Namun menurut hasil penelitian dan pengamatan yang akan kami tuangkan di dalam Tesis ini menunjukkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Kami berpendapat demikian dikarenakan berdasarkan survey di lapangan, sejak munculnya PP Nomor 99 Tahun 2012 ini banyak dijumpai adanya gejolak di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seperti banyaknya terjadi pembakaran LAPAS, diantaranya yang terjadi pembakaran di LAPAS Bance Bandung, pembakaran di LAPAS Bali. Kemudian yang baru-baru ini terjadi pelarian lebih dari 400 narapidana, yang terekspos di media masa cetak maupun media masa elektronik. Hal ini lah merupakan akibat akibat sejak munculnya atau diterbitkannya PP Nomor 99 Tahun 2012, yang membuat keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi terganggu dan muncul gejolak baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai key instrument, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara mendalam; (2) observasi; dan (3) dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif. Dengan hasil akhir bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 masih belum bisa mengakomodasi kepentingan Hak-Hak Warga Binaan di Indonesia.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Terhadap PP Nomor 99 Tahun 2012

ABSTRACT

Whereas the provisions on the terms and procedures for remission, assimilation and parole are regulated in Government Regulation No. 32 1999 on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Citizens of Correctional Facilities as amended by Government Regulation No. 28/2006 concerning Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Citizens Correctional Penitentiary. Then these regulation was changed again to Government Regulation of the Republic of Indonesia N0. 99 Year 2012. However, according to the results of research and observations that we will pour in this Thesis shows Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 Year 2012, not yet fitlly reflect the interests of security, public order, and sense of justice perceived by society today, so it needs to be changed We think so because based on the survey in the field, since the emergence of Government Regulation No. 99 Of 2012 is found many fluctuations in the Penitentiary (LAPAS). Like the number of fires occurred LAPAS, including the burning in the Bance Of Bandung Base, burning in Bali s LAPAS. Then the recent escape of more than 400 inmates, exposed in mass media and electronic media. This is the consequence since the emergence or the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012, which makes security, public order, and sense of justice for the people, especially the people in the Penitentiary (LAPAS) to be disturbed and new turmoil The approach used in this study is a qualitative approach. Data collection is carried out by the researcher himself as a key instrument, data collection techniques are carried out in a way; (1) in-depth interviews; (2) observation; and (3) documentation. For data analysis using descriptive techniques. With the final result that Government Regulation Number 99 of 2012 is still unable to accommodate the interests of Patronage Rights in Indonesia.

Keywords: Juridical Review on PP N0. 99 Of 2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN DI INDONESIA”** dengan baik dan lancar. Penulisan Tesis hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs. Bambang Karsono., S.H, M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, S.Pd., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan Tesis.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.

Bekasi, 06 Juli 2018

Widya Alawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PEGANTAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Bagan Teori	13
E. Metode Penelitian	39
F. Sistematika Penulisan	42
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tujuan dari Pidana	45
2.2 Teori-Teori Tentang Tujuan Pidana	45
2.2.1 Teori Pembalasan	46
2.2.2 Teori Tujuan	62
2.2.3 Teori Menggabungkan atau Teori Integratif.	72
BAB III : EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999	

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

3.1 Fungsi Perumahan.....	76
3.2 Keberadaan Lembaga Perumahan Dikaitkan Dengan Hak Warga Binaan	80
3.3 Hak-Hak Warga Binaan Menurut UUD Nomor 12 Tahun 1995	81

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN PERMASALAHAN YANG MUNCUL AKIBAT DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

4.1 Narapidana Bagian Dari Masyarakat	107
4.2 Strategi Pembinaan Narapidana	114
4.3 Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perumahan .	115

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP